

MANAJEMEN PPKn DI SEKOLAH MENENGAH

Yahya Mulyadi¹

Hikmat Taufik²

yahyamulyadi@unsur.ac.id¹
hikmattaufik1964@gmail.com²

Universitas Suryakencana

Abstrak

PPKn merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah berdasarkan Kurikulum 2013 yang saat ini berlaku. Sebagai mata pelajaran wajib, PPKn harus ditempuh oleh semua siswa. Guru PPKn memiliki peranan dominan dalam merekayasa pembelajaran untuk mencapai tujuan PPKn. Secara kurikuler PPKn memiliki tujuan membentuk siswa menjadi warga negara dan warga dunia yang baik. Guru PPKn dituntut untuk menjalankan manajemen PPKn dengan baik dan benar. Manajemen PPKn adalah urusan aktualisasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaan, guru PPKn adalah pengembang kurikulum nasional menjadi kurikulum operasional untuk siswa dan kelasnya masing-masing. Kurikulum operasional sebagai rencana pelajaran dilaksanakan melalui proses (kegiatan) belajar-mengajar alias pembelajaran. Evaluasi atau penilaian adalah proses menentukan nilai dan makna keberhasilan PPKn berdasarkan standar yang ditetapkan, tidak hanya mengenai hasil belajar siswa tetapi juga melihat efektifitas proses belajar-mengajar dan kelayakan rencana pelajaran. Kurikulum 2013 menuntut guru PPKn untuk menerapkan Pendekatan Saintifik dalam pembelajaran dan menggunakan Pendekatan Otentik untuk mengetahui hasil belajar siswa.

Kata kunci: *Kurikulum PPKn 2013, kurikulum nasional, kurikulum operasional, warga negara dan warga dunia yang baik, manajemen PPKn, pendekatan saintifik, penilaian otentik.*

PENDAHULUAN

PPKn adalah mata pelajaran di sekolah. Jika mata pelajaran dimaknai sebagai kurikulum yakni kurikulum dalam arti sempit, maka keberadaan PPKn dalam kurikulum yang berlaku di sekolah termasuk di sekolah menengah adalah salah satu mata pelajaran dari sejumlah mata pelajaran yang berlaku. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah

Menengah menetapkan mata pelajaran terdiri atas mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran PPKn adalah salah satu mata pelajaran wajib.

PPKn sebagai mata pelajaran memiliki tujuan, yang pada dasarnya bertujuan agar siswa dapat menjadi warga negara dan warga dunia yang baik. Untuk mencapai tujuan itu diadakan pemanfaatan sumber daya. Menurut Ardinata (2010) dalam *raiardinata.blogspot.com* sumber daya antara lain terdiri atas manusia, barang, uang, dan informasi. Di sini muncul manajemen PPKn. Dalam manajemen PPKn, guru sebagai penggerak dalam mencapai tujuan, berperan menjalankan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan menyangkut penyusunan program PPKn. Pelaksanaan menyangkut proses belajar-mengajar alias pembelajaran. Evaluasi adalah proses menentukan nilai dan makna hasil belajar, efektivitas pembelajaran, dan kelayakan program. Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi itu dituntut berdasarkan sistem tata kelola PPKn.

LANDASAN TEORI

Perencanaan PPKn

Sejalan dengan fungsi manajemen, guru PPKn berposisi sebagai perencana, pelaksana pembelajaran, dan evaluator. Dalam posisi sebagai perencana, guru PPKn adalah pengembang kurikulum. Guru PPKn sebagai pengembang kurikulum memiliki peranan sebagai perekayasa pembelajaran. Rekayasa dilakukan melalui proses perencanaan. Guru PPKn sebagai perencana adalah *curriculum developer*. Dengan mengacu pada kurikulum PPKn yang berlaku nasional, guru PPKn menyusun rencana pelajaran yang layak dilaksanakan sehingga operasional-aktual bagi dirinya mengajar dan bagi siswanya belajar.

Dalam Kurikulum 2013, kurikulum sekolah dan silabus telah disusun oleh Kemendikbud. Guru PPKn bertugas mengembangkan silabus PPKn menjadi RPP. RPP merupakan persiapan pembelajaran guru. Mulyasa (2013:181) menyatakan: “Dalam Kurikulum 2013, pengembangan silabus tidak lagi oleh guru, tetapi sudah disiapkan oleh tim pengembang kurikulum, baik di tingkat pusat maupun wilayah”.

Diketahui bahwa dalam silabus antara lain ditetapkan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengkaji pokok bahasan. Namun dalam pelaksanaannya, guru PPKn perlu menyesuaikan dengan keadaan waktu efektif untuk pembelajaran di sekolahnya berdasarkan kalender akademik. Dengan demikian, maka sebelum menyusun RPP perlu membuat program tahunan dan program semesteran.

Program tahunan merupakan rancangan penentuan alokasi waktu untuk satu tahun pelajaran guna mencapai kompetensi yang mempertimbangkan jumlah jam pelajaran dan kedalaman substansi pokok bahasan. Adapun program semesteran adalah rancangan pengkajian pokok bahasan untuk satu semester berdasarkan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Dengan memperhatikan program tahunan dan semesteran, guru PPKn menyusun RPP. Panduan penyusunan RPP merupakan rambu-rambu untuk pengembangan silabus yang masih berupa garis-garis besar kurikulum. Panduan tersebut perlu diperhatikan guru PPKn dalam melakukan pengembangan sehingga menjadi kurikulum yang layak tercapai berupa RPP.

Mulyasa (2011: 218-222) mengemukakan rambu-rambu penyusunan RPP berupa prinsip-prinsip dan cara pengembangannya. Abidin (2014:294-299) memaparkan rambu-rambu berdasarkan Kurikulum 2013 yang terdiri atas prinsip-prinsip, persyaratan rencana pelaksanaan pembelajaran dan sistematika RPP.

Sistem tata kelola PPKn

Ketika guru PPKn telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai perencana yakni telah selesai membuat RPP, maka tugas selanjutnya mengimplementasikan rencana itu, baik rencana pembelajaran maupun rencana evaluasi dilaksanakan. Pelaksanaan harus efektif di samping prosesnya juga mesti berjalan sesuai tuntutan.

Pembelajaran dan evaluasi itu dua komponen implementasi PPKn. Guru perlu mengelola dengan baik dan benar sesuai tuntutan pengelolaan masing-masing dalam PPKn. Penulis memandang tuntutan pengelolaan sebagai sistem tata kelola, dengan demikian perlu dijalankan dengan baik dan benar, kalau tidak implementasi PPKn baik pembelajaran maupun evaluasi dalam proses maupun hasilnya akan bermasalah.

Berdasarkan Lampiran Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah (Bagian I ButirA Nomor 2.d.), diketahui bahwa Kurikulum 2013 menggariskan penguatan tata kelola pelaksanaan kurikulum termasuk untuk PPKn sebagai berikut. Pelaksanaan kurikulum selama ini telah menempatkan kurikulum sebagai daftar mata pelajaran. Pendekatan kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah diubah sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Oleh karena itu dalam Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut:

- 1) tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif;
- 2) penguatan manajemen sekolah melalui kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan (*educational leader*); dan
- 3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran.

Garis penguatan tersebut menuntut penguatan tata kelola pelaksanaan kurikulum yang terkait dengan kinerja guru, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, dan pendayagunaan sarana-prasarana. Sebagaimana dikemukakan di atas, penulis melihat pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi sebagai implementasi dari rencana pembelajaran dan evaluasi yang dimuat dalam RPP guru. Dengan demikian tiga bentuk penguatan itu yang diistilahkan dalam Lampiran Permendikbud di atas sebagai Penguatan Tata Kelola Kurikulum, terlihat sebagai penguatan terhadap pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi.

Pembelajaran adalah proses atau serangkaian kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan berdasarkan rencana yang disusun. Strategi pembelajaran yang ditetapkan guru PPKn melalui perencanaan diimplementasikan. Strategi meliputi pendekatan yang dipakai, metode-media yang dipergunakan, dan langkah-langkah prosedural pembelajaran yang ditempuh. Langkah-langkah prosedural utama meliputi tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup.

Kurikulum PPKn 2013 sama seperti KTSP PKn 2006 menuntut pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan (PAIKEM).

Sebenarnya, sejak 1979 ketika berlaku Kurikulum PMP 1975, Djahiri (1975) sebagai salah seorang ahli PKn melalui bukunya *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral-VCT dan Games dalam VCT* telah memperkenalkan model-model pembelajaran yang diperhitungkan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pembelajaran itu yaitu melalui model-model pembelajaran *Value Clarification Technique (VCT)* dan model-model permainan. Ahli PKn lain Winataputra dan Budimansyah (2007) dalam bukunya *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas* telah memperkenalkan model-model pembelajaran nilai dan model pembelajaran adaptif Portofolio. Model-model pembelajaran nilai antara lain Pembelajaran Nilai Aqidah Keberagamaan, Pembelajaran Nilai Sosial-kultural, Pembelajaran Nilai Fisikal-Rohaniah, Pembelajaran Kecerdasan Substantif berilmu, dan Pembelajaran Personal Sosial-politik. Selain itu, Budimansyah (2010) dalam bukunya *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa*, telah memperkenalkan model-model pembelajaran adaptif *Project Citizen* terkait Bulu Tangkis, Hutan Hujan, Konflik Antar Umat Beragama, Persoalan Kemiskinan, Polusi Udara.

Namun demikian, sampai dengan diberlakukannya Kurikulum PPKn 2013, kurikulum sebelumnya termasuk KTSP PKn 2006 dipandang kurang menerapkan prinsip-prinsip PAIKEM karena pembelajaran orientasinya berpusat pada guru bukan berpusat pada siswa (Kemendikbud, 2013:12; Maftuh, 2014:9). Orientasi berpusat pada guru melalui penerapan Kurikulum 2013 diubah menjadi beerorientasi berpusat pada siswa. Ciri-ciri pembelajaran berpusat pada guru yaitu satu arah, pasif, abstrak, pribadi, luas semua materi diajarkan, stimulasi rasa tunggal (beberapa panca indera), alat tunggal (papan tulis), hubungan satu arah, produksi masa (siswa memperoleh dokumen yang sama), usaha sadar tunggal (mengikuti cara yang seragam), mempelajari satu sisi pandang ilmu, kontrol terpusat oleh guru, pemikiran faktual, penyampaian pengetahuan. Ciri-ciri pembelajaran berpusat pada siswa yaitu interaktif, lingkungan jejaring, aktif menyelidiki, konteks dunia nyata, pembelajaran berbasis tim, perilaku khas memberdayakan keterikatan, stimulasi ke segala penjuru (semua panca indera), alat multi media, kooperatif, kebutuhan pelanggan (siswa mendapat dokumen suseuai ketertarikan berdasarkan

potensinya), jamak (keberagaman inisiatif individu siswa), pengetahuan disiplin jamak (pendekatan multi disiplin), otonomi dan kepercayaan (siswa bertanggung jawab), kritis (membutuhkan berpikir kreatif), pertukaran pengetahuan (antara guru dan siswa, siswa dan siswa lainnya),

Pembelajaran menurut tuntutan kurikulum 2013 harus diupayakan berdasarkan standar proses yang menempuh langkah-langkah mengamati, menanya, mengolah/menalar, menyimpulkan, menajikan/mengkomunikasikan. Semula standar itu berdasarkan KTSP 2006 menempuh langkah-langkah eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Selain itu, siswa belajar tidak hanya di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat, guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal tetapi melalui contoh dan teladan. Modus pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 ada proses pembelajaran langsung dan tidak langsung. Oleh sebab itu, untuk menguatkan pembelajaran maka dalam kurikulum 2013 digunakan pendekatan saintifik dan kontekstual, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu bukan diberi tahu, menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi pembawa pengetahuan, dan berfikir logis, sistematis, kreatif.

Budimansyah (2010:88) memberikan contoh kegiatan pembelajaran di luar kelas yang berkaitan dengan PPKn baik kegiatan di sekolah, maupun dalam keluarga dan masyarakat seperti ekstrakurikuler, bazar sekolah, bakti sosial, karyawisata, pendidikan interventif melalui keluarga dan masyarakat misalnya dalam pemantapan keyakinan beragama, melaksanakan peribadatan, media masa.

Maftuh (2014:10) mengemukakan esensi, kriteria, dan model-model pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik dalam PPKn sebagai berikut.

1) Esensi Penerapan Pendekatan Saintifik

- a) Merujuk pada teknik investigasi atas suatu fenomena, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan sebelumnya;

- b) Lebih mengedepankan penalaran induktif, yaitu memandang fenomena atau situasi secara spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan;
 - c) Berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik;
 - d) Memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi atau eksperimen, mengolah informasi/data, menganalisis, kemudian memformulasi dan menguji hipotesis.
- 2) Kriteria Penerapan Pendekatan Saintifik
- a) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu;
 - b) Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berfikir logis;
 - c) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran;
 - d) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran;
 - e) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berfikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pelajaran;
 - f) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.
- 3) Beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu *reflective thinking, problem solving, problem based-learning, project-based learning, discovery, inquiry, investigation, rational decision making process.*

Kurikulum 2013 menuntut PPKn untuk menerapkan pendekatan otentik dalam penilaian. Menurut penjelasan Kemendikbud (2013:6) penerapan tersebut merupakan pergeseran dari penilaian melalui tes yang mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, sedangkan penilaian otentik mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.

Abidin (2014:81) mengemukakan: "... penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa". Menurut Fadlillah (2014:207): "Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

Dari penjelasan tentang penilaian otentik tersebut di atas, terlihat penilaian otentik merupakan proses menetapkan nilai seluruh kompetensi siswa meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan berbagai data proses dan hasil belajar sehingga memberikan gambaran keberhasilan perkembangan belajar mereka.

Rambu-rambu penilaian otentik yang dikeluarkan Kemendikbud (2013:6, 15) menggariskan bahwa penilaian tersebut berbasis kompetensi, memperkuat penilaian acuan patokan, tidak hanya pada level kompetensi dasar tetapi juga kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan, mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa, pertanyaan tidak memiliki jawaban tunggal, memberi nilai jawaban nyeleneh, menilai proses pengerjaannya bukan hanya hasilnya, menilai spontanitas/ekspresif.

Nurgiyantoro dalam Abidin (2014:83) mengemukakan karakteristik penilaian otentik sebagai berikut.

1. Misi sekolah adalah mengembangkan warga negara yang produktif.
2. Untuk menjadi warga negara produktif, seseorang harus mampu menunjukkan penguasaan melakukan sesuatu secara bermakna dalam dunia nyata.
3. Sekolah mesti mengembangkan siswa untuk dapat mendemonstrasikan kemampuan/keterampilan melakukan sesuatu.

4. Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, guru harus meminta siswa melakukan aktivitas tertentu secara bermakna yang mencerminkan aktivitas di dunia nyata.
5. Penilaian memandu pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan guru adalah mempertimbangkan tugas yang harus didemonstrasikan oleh siswa sebagai bentuk penguasaan performa atas tugas tersebut.

Apabila dalam pandangan ahli, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai dan makna sesuatu (Hasan, 1988:13; Triwiyanto, 2015:189), lalu dikaitkan dengan karakteristik penilaian otentik itu, maka dapat dijelaskan bahwa penerapan penilaian otentik dalam PPKn untuk memberikan gambaran perihal keberhasilan pembelajaran PPKn, dalam membina siswa agar menjadi warga negara yang produktif. Dipahami, bahwa warga negara produktif apabila berkemampuan secara bermakna, artinya dapat memberi manfaat bagi kemajuan kehidupan bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Warga negara demikian dalam istilah yang populer adalah warga negara yang baik, juga sekaligus menjadi warga dunia yang baik. Oleh karena itu, penilaian PPKn harus seutuhnya dalam melihat kemampuan siswa dan maknanya sebagai keberhasilan pembelajaran.

Demikian penerapan penilaian otentik diperhitungkan akan mampu melihat tentang keberhasilan pencapaian tujuan PPKn. Memang melalui penilaian tersebut kompetensi atau kesadaran kewarganegaraan siswa harus dapat diketahui. Kesadaran kewarganegaraan dalam arti siswa bersikap, berketerampilan, dan berpengetahuan kewarganegaraan. Di samping itu, karena melihat keberhasilan maka proses pembelajaran PPKn pun dapat diketahui efektivitasnya termasuk kelayakan rencananya.

Keberhasilan PPKn dalam hasil belajar dan proses pembelajaran, sesungguhnya akan dapat diketahui melalui penilaian baik dalam fungsinya yang formatif maupun sumatif. Terkait dengan fungsi penilaian tersebut ada penjelasan dari Hasan (1988:39) sebagai berikut.

Fungsi formatif evaluasi dilaksanakan apabila hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. ... Bagian yang diperbaiki itu dapat saja merupakan bagian dari kurikulum sebagai rencana, kegiatan ataupun hasil. Perbaikan itu dapat pula dilakukan ketika melakukan evaluasi terhadap dimensi kurikulum lainnya. Misalnya hasil evaluasi terhadap kurikulum sebagai kegiatan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kurikulum sebagai rencana. Hasil evaluasi terhadap kurikulum sebagai rencana dapat dipergunakan untuk memperbaiki kurikulum sebagai ide. Tentu saja beberapa hal perlu dipertimbangkan pada waktu membuat disain evaluasi agar hasil tersebut bersifat berarah ganda seperti itu.

Suatu hal yang perlu mendapat perhatian di sini ialah fungsi formatif evaluasi dilaksanakan ketika kurikulum tersebut belum dianggap sebagai sesuatu yang final.... Setelah itu maka evaluasi yang dilakukan haruslah dalam rangka fungsi sumatif.

Dari pernyataan Hasan, ditarik pelajaran untuk penilaian PPKn yaitu berfungsi formatif atau sumatif dilihat berdasarkan tuntas atau belum tuntas kurikulum dilaksanakan. Apabila melalui penilaian, hasilnya digunakan untuk perbaikan berarti pelaksanaan kurikulum belum tuntas, maka dalam keadaan begini penilaian itu berfungsi formatif. Misalnya penilaian harian PPKn berupa ulangan-ulangan dalam rangka pelaksanaan RPP, hasilnya digunakan untuk perbaikan rencana dan kegiatan pembelajaran, maka penilaian tersebut berfungsi formatif. Tetapi bila penilaian yang dilakukan, hasilnya tidak dimaksudkan untuk perbaikan berarti pelaksanaan kurikulum tuntas, maka penilaian tersebut adalah berfungsi sumatif misalnya Penilaian (Ujian) Akhir Tahun PPKn.

Ada pernyataan problematis dari Mulyasana (2014:5) terkait dengan penilaian, yaitu: Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pembelajaran. Pembelajaranpun dipersempit pula menjadi proses transfer ilmu dan keterampilan. Ujung-ujungnya dikesankan bahwa puncaknya pendidikan adalah ujian. Dengan demikian, ada “pengkondisian” bahwa puncaknya prestasi pendidikan adalah kemampuan menjawab sejumlah soal. Oleh karena itu, pembelajaran diarahkan pada usaha mencetak manusia-manusia penghapal untuk menjawab sejumlah soal.

Konsep dan system seperti ini secara tidak langsung telah mengabaikan tujuan pendidikan nasional, merusak filsafat pendidikan dan teori-teori pendidikan. ... Tujuan pendidikan nasional, filsafat pendidikan dan teori-teori pendidikan, terhambat oleh system evaluasi pembelajaran yang hanya mampu menilai unsur kognitif dan atau psikomotor pada level permukaan. Sementara nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan sebagainya menjadi terabaikan. Akibatnya, penyelenggaraan pendidikan tidak kokoh berdiri di atas landasan filosofi dan tidak berdiri di atas teori yang jelas.

Pernyataan Mulyasana itu memperlihatkan pentingnya penilaian, antara lain penilaian PPKn untuk mengetahui kemampuan siswa secara utuh setelah menempuh proses pembelajaran. Dalam penilaian, dengan berpijak pada teori Bloom dan kawannya dalam Dimiyati dan Mudjiono, (2006:26) memang tidak cukup hanya untuk mengetahui kemampuan kognitif dan atau kemampuan psikomotor, tetapi harus dapat mengetahui pula kemampuan afektif. Ditegaskan oleh Kemendikbud (2012:24), bahwa dalam Kurikulum 2013 penilaian hasil belajar harus bergeser dari penilaian melalui tes yang hanya mengukur kompetensi pengetahuan saja, menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Bahkan Kemendikbud (2013:15) menentukan penguatan proses penilaian dalam Kurikulum 2013 yaitu mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari yang rendah sampai tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan), mengukur proses kerja siswa bukan hanya hasil kerja siswa, menggunakan portofolio pembelajaran siswa. Oleh sebab itu, memang tepat pernyataan Mulyasana bahwa penilaian sangat tidak memadai apabila hanya untuk mengetahui kemampuan kognitif dan atau psikomotor dalam level yang rendah, sementara nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan sebagainya terabaikan.

Dengan penerapan penilaian otentik, diperhitungkan kemampuan utuh siswa seperti diungkapkan di atas dapat diketahui, sekaligus juga dapat diketahui kelayakan rencana dan ketepatan proses pembelajaran yang dilakukan. Terkait

dengan hal ini Wahab dan Sapriya (2011:352) menyatakan bahwa hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi:

- a. Pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara, yaitu aspek kognitif sebagai hasil belajar mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Kepribadian, yaitu beberapa aspek kepribadian sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
- c. Perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku sebagai penerjemahan dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara Indonesia.

Demikian Wahab dan Sapriya memperlihatkan hasil belajar yang harus diketahui. Ditegaskan pula, bahwa masing-masing berada pada domain yang berbeda, yaitu pemahaman berada pada domain kognitif, berbagai aspek kepribadian berada pada domain afektif, sedangkan perilaku berkepribadian berada pada domain keperilakuan. Ada berbagai aspek menyangkut hasil belajar itu yang disebutkan oleh Wahab dan Sapriya (2011:351) sebagai kesadaran dan wawasan siswa terhadap status, hak, kewajiban, dan kualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai aspek dimaksud sebagai berikut.

... patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terlihat hasil belajar PPKn sebenarnya terkait dengan penguasaan terhadap materi pelajaran PPKn. Materi itu sebagai isi kompetensi atau kemampuan yang diharapkan. Wahab dan Sapriya dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan materi PPKn secara garis besar ada delapan butir, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, norma; hukum dan peraturan, hak asasi manusia, warga negara, konstitusi, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi. Di sini tidak nyata terlihat kompetensi menyangkut keimanan, ketakwaan, akhlak mulia

menjadi target hasil pembelajaran PKN, sehingga pantas apabila Mulyasana seperti di atas telah dikemukakan menyatakan terabaikan.

Dalam Kurikulum PPKn SMA 2013 yang terabaikan itu menjadi target. Diketahui dari empat kompetensi inti, kompetensi kesatu adalah tentang agama yakni siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Di sinilah antara lain penulis melihat PPKn besama mata pelajaran lain bahkan bersama pihak-pihak lain di sekolah dan luar sekolah harus berperan membangun karakter siswa. Di samping itu, PPKn sebagai pendidikan karakter, berperan membangun karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila yang lainnya sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana dingkapkan dalam kompetensi inti kedua seperti jujur, disiplin, tanggungjawab, toleran, santun.

Seutuhnya, berbagai aspek isi kompetensi baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun keterampilan yang menjadi target hasil pembelajaran PPKn berdasarkan Kurikulum SMA 2013 sesuai Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, yaitu Ajaran Agama, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Demokrasi, HAM, Warga Negara, Pemerintahan, Sistem Hukum dan Peradilan, Budaya Politik, Hubungan Internasional.

Untuk kepentingan penilaian dipergunakan berbagai jenis, teknik dan instrumen. Dimaklumi bahwa jenis penilaian baik tes maupun nontes dapat dipakai. Beragam teknik dan bentuk instrumen dari kedua jenis penilaian itu, yang dapat dipergunakan dalam PPKn, dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya (2011:357) dengan susunan penampilannya dibuat penulis sebagai berikut.

- 1) Tes tertulis: tes pilihan (pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dll.) dan tes isian (isian singkat dan uraian).
- 2) Observasi (pengamatan): lembar observasi (lembar pengamatan).
- 3) Penugasan individual atau kelompok: pekerjaan rumah dan proyek.
- 4) Tes lisan: daftar pertanyaan.
- 5) Penilaian portofolio: lembar penilaian portofolio.
- 6) Jurnal: buku catatan jurnal.
- 7) Penilaian diri: kuessioner/lembar penilaian diri.
- 8) Penilaian antar teman: lembar penilaian antar teman.

Djahiri (1990:11,36) melihat bahwa PPKn perlu menerapkan multi evaluasi tidak semata-mata evaluasi kognitif melainkan juga evaluasi afektif serta psikomotor. Argumentasi beliau perihal penerapan itu adalah karena kegiatan evaluasi yang baik dan layak serta penuh makna guna apabila tidak menimbulkan kebosanan dan atau beban yang berat, yakni dengan memberi variasi bentuk, tempat, dan waktu pelaksanaan yang bermacam ragam.

Demikian PPKn dituntut mempergunakan berbagai jenis, teknik, dan bentuk instrumen. PPKn dapat menerapkan jenis tes maupun nontes. Mengacu pada pernyataan Supardi (2015:28) bahwa teknik-teknik penilaian autentik dapat dipilih secara bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing kompetensi yang hendak dicapai, maka demikianlah dalam penilaian PPKn dapat memilih teknik-teknik penilaian autentik secara bervariasi sesuai dengan kepentingan kompetensi yang akan dicapai. Sejalan dengan teknik-teknik evaluasi yang dikemukakan oleh Wahab dan Sapriya di atas, teknik-teknik penilaian autentik yang dikemukakan Supardi yaitu penilaian tertulis, penilaian lisan, penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian pengamatan, penilaian diri.

Dahiri (1990:37) mengajarkan penggunaan model pembelajaran *Value Clarification Techniques (VCT)* sekaligus sebagai salah satu model penilaian dalam PPKn, dalam hal ini beliau menyatakan:

VCT ... adalah label untuk Strategi Pengajaran Nilai Moral, yang oleh kelompok P3G dan P2LPTK Depdikbud serta Kurikulum SPG dan SMA 1975 dilabel dengan "Teknik Mengklarifikasi Nilai". Dan kalau kami sebutkan VCT juga termasuk perangkat Games/Permainan. VCT sebagai metoda atau teknik belajar/mengajar; butiran media stimulusnya, dan proses KBS-KBM nya khusus untuk membelajarkan dan atau melahirkan KMG (Kegiatan Mengajar Guru).

Sedangkan VCT sebagai pola evaluasi nilai-moral secara bentuk sama dengan VCT sebagai metoda tetapi isi media stimulus, cara proses, dan waktu (mungkin juga tempat) bersifat khusus. Yakni diarahkan sebagai media indikator ukur//penilaian yang akan dikaji dan diprosesnya sendiri/sekelompok.

Oleh karena itu ... kami ingatkan persyaratan "keterjangkauan" isi dan bentuk.

Apapun jenis VCT dan games dapat digunakan sebagai bentuk evaluasi.

Djahiri (1990:36) mengajarkan pula pemanfaatan lingkungan sekitar dalam evaluasi PPKn. Dalam hal ini beliau menyatakan: Akhirnya ingin kami sampaikan salah satu hal lain mengenai evaluasi dalam pendidikan nilai-moral, khususnya pendidikan Pancasila, yakni adanya momentum dan alat kegiatan evaluasi yang melibatkan orang tua, orang serumah, sesama dan atau masyarakat sekitar amat banyak manfaatnya bagi pembinaan dunia afektif peserta didik.

Manfaat lain kegiatan seperti ini ialah penulisan program persekolahan ke dunia lingkungan siswa.

Dari pernyataan Djahiri di atas, dapat diketahui bahwa VCT termasuk berbagai permainannya dapat dimanfaatkan sebagai model dalam menerapkan teknik penilaian otentik dalam PPKn, misalnya dalam menerapkan teknik observasi dan penilaian antar teman. Demikian pula lingkungan sekitar dapat dilibatkan dalam penilaian, yang disebut Djahiri sebagai alat kegiatan evaluasi. Dengan demikian penilaian PPKn menuntut penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

KESIMPULAN

Mata Pelajaran PPKn seperti mata pelajaran yang lain perlu ditangani dengan baik dan benar. Penanganan yang baik dan benar sesuai prosedur pengelolaannya menurut manajemen PPKn. Manajemen tersebut merupakan manajemen kurikulum yang menurut fungsinya memiliki urusan prosedural perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Guru PPKn adalah perencana, pelaksana, dan evaluator dalam kurikulum PPKn. Sehubungan dengan peranannya yang demikian guru PPKn adalah perekayasa kurikulum.

1. Dalam perencanaan, guru PPKn sebagai perekayasa kurikulum adalah pengembang kurikulum nasional PPKn menjadi kurikulum operasional-aktual. Kurikulum yang dikembangkannya antara lain Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk siswa dan kelasnya.

2. Rekayasa pembelajaran dan evaluasi dilakukan sesuai perencanaan. Guru PPKn melakukannya sesuai tuntutan sistem tata kelola yang berlaku. Rekayasa pembelajaran dan evaluasi kadang-kadang disebut implementasi kurikulum oleh guru. Dua bentuk implementasi itu merupakan komponen dari sistem tata kelola implementasi PPKn.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata. 2010. *raiardinata.blogspot.com*
- Budimansyah. Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung:Widya Aksara.
- Djahiri, A. Kosasih. 1985. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral-VCT dan Games dalam VCT*. Bandung: PMPKn FPIPS IKIP.
- Hasan, S. Hamid. 1988. *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud.
- Kemendikbud. 2013. *Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013*.
- Maftuh, Bunyamin. 2014. *Implementasi Pembelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013*. Bandung: UPI.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- , 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasana, Dedi. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015.
- Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013.
- Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016.
- Supardi. 2015. *Penilaian Autentik*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Triwiyanto, Teguh. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Azis dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, Udin S. 2007. *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Sps UPI.

